

## **ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019**

**Teti Sugiarti**

[tetisugiarti@gmail.com](mailto:tetisugiarti@gmail.com)

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Trunojoyo Madura

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dengan judul Analisis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemiskinan di Kabupaten Mojokerto meliputi: garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, dan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga/individu miskin Kabupaten Mojokerto ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, dan demografi.

Penyusunan Analisis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, membutuhkan data-data yang akan digunakan dalam proses analisis. Data tersebut berupa data-data sekunder yang berupa data penduduk dan tenaga kerja, pendidikan, perumahan, serta data kemiskinan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data lain dari BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Mojokerto, juga data dari TNP2K dan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time series data) untuk kurun waktu minimal 3-5 tahun terakhir.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 6,31 persen (Rp. 23.393,-), pada tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp. 370.610,-/kapita/bulan meningkat menjadi Rp. 394.003,-/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 turun sebesar 2,46 persen (2.740 orang) terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2018. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tahun 2019 turun sebesar 0,52 terhadap nilai indeks tahun sebelumnya, hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin per kapita per bulan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 semakin mendekati garis kemiskinan;

**Kata kunci : Kemiskinan, Ekonomi, Indeks.**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Kemiskinan masih merupakan masalah fenomenal di sepanjang sejarah Indonesia, dan merupakan masalah yang kompleks serta bersifat multi dimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah pula

melengkapi dengan beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Kementerian untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Chambers dalam Nasikun, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 merupakan salah satu Kabupaten/Kota dengan persen-tase penduduk miskin pada kategori sedang karena angka persentase kemiskinan Kabupaten Mojokerto berada diantara angka persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 berjumlah 108.801 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 10,08 persen (sebanyak 111.789 jiwa) dari total jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebesar 2,46 persen (sekitar 2.740 jiwa) terhadap tahun sebelumnya.

Salah satu aspek penting untuk mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan. Data kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan analisis kemiskinan yang dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran.

### **Tujuan Penelitian**

Dalam penyusunan Analisis Laporan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto serta *stakeholder* lainnya agar strategi penang-gulangan kemiskinan dapat dioptimalkan dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dengan tujuan disusunnya analisis kemiskinan Kabupaten Mojokerto

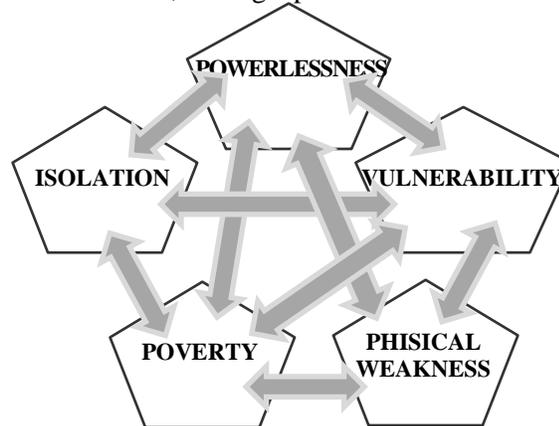
1. Mengetahui kemiskinan di Kabupaten Mojokerto meliputi: garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan
2. Mengetahui karakteristik rumah tangga/individu miskin Kabupaten Mojokerto ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, dan demografi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep dan Teori Kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Robert Chambers, menggunakan konsep kemiskinan terpadu untuk me-mahami masalah kemiskinan di negara sedang berkembang. Menurut Chambers menjelaskan tentang teori perangkat kemiskinan sebagai berikut:

Gambar 1, Perangkat Kemiskinan



Perangkat Kemiskinan

Sumber: *Chambers*

Kemiskinan, merupakan unsur pertama yang membuat orang miskin. Kemiskinan menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor yang lainnya. Unsur kedua adalah kelemahan jasmani. Kelemahan jasmani yang dialami seseorang mendorongnya ke arah kemiskinan melalui berbagai cara: produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah, tidak mampu bekerja lebih lama. Unsur ketiga adalah isolasi. Isolasi atau keterasingan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu lingkungan dan pendidikan. keterasingan yang disebabkan oleh faktor lingkungan disebut juga sebagai kemiskinan natural, dimana masyarakat menjadi terasing karena tempat tinggal mereka yang jauh dari jangkauan pemerintah, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi atau bantuan. Sedangkan dari faktor pendidikan, keterasingan yang dialami masyarakat miskin karena mereka umumnya berpendidikan rendah, sehingga sering dikucilkan dan tidak di hargai keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya.

Unsur keempat adalah kerentanan. Kerentanan masyarakat miskin disebabkan karena mereka tidak memiliki cadangan uang atau makanan untuk keadaan darurat. Unsur penyebab kemiskinan yang kelima adalah ketidakberdayaan.

Ketidakberdayaan masyarakat miskin bisa dilihat dari minimnya akses hukum dan pemerintah yang mereka dapatkan. Mereka juga cenderung tidak berdaya dalam menghadapi orang-orang yang mengeksploitasi mereka, seperti halnya rentenir. Bila dikaitkan dengan teori Robert Chambers di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya rumah tangga miskin memiliki kelima unsur tersebut. Ini terjalin erat bagaikan mata rantai yang saling mengikat. Seseorang yang mengalami kemiskinan bisa dipastikan ia akan sulit keluar dari kemiskinannya tersebut.

Menurut teori ini, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapatkan perhatian utama dikarenakan kerentanan berhubungan dengan ketidak-mampuan keluarga miskin dalam menyediakan sesuatu guna menghadapi keadaan darurat. Sedangkan ketidakberdayaan dicerminkan dari seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. sebagai contoh, suatu misal, suatu kampung yang mayoritas kawasannya di huni oleh rumah tangga miskin. Mulanya mereka miskin karena disebabkan oleh keadaan kemiskinan itu sendiri. Kemudian mereka mengalami kelemahan jasmani, lalu terasingkan, mengalami kerentanan, dan akhirnya tidak berdaya menghadapi dunia luar. Mereka semakin terpuruk lantaran beratnya beban ekonomi yang harus di tanggung hingga rentan dan tidak berdaya. Adanya ketidakberdayaan masyarakat miskin ini juga dapat dilihat dari bantuan yang seharusnya diberikan kepada si miskin tetapi malah diberikan kepada kelas di atasnya yang tidak berhak menerimanya, seperti raskin (beras untuk keluarga miskin) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

## **METODOLOGI**

### **Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penyusunan Analisis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, membutuhkan data-data yang akan digunakan dalam proses analisis. Data tersebut berupa data-data sekunder yang berupa data penduduk dan tenaga kerja, pendidikan, perumahan, serta data kemiskinan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data lain dari BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Mojokerto, juga data dari TNP2K dan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu minimal 3-5 tahun terakhir.

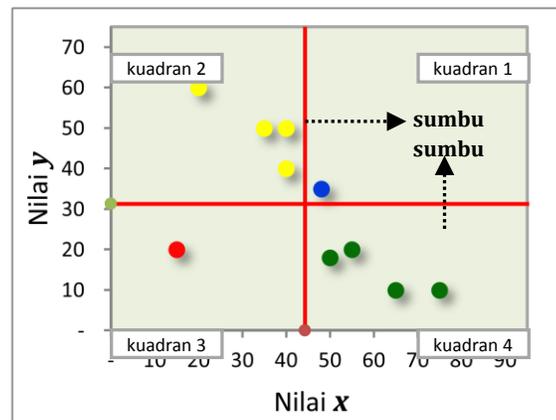
### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Studi Pustaka: Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berupaya mengidentifikasi kondisi umum maupun spesifik yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dengan mempelajari catatan-catatan; dokumen-dokumen; dan literatur dari berbagai media baik cetak maupun elektronik juga dilakukan untuk mempelajari lan-dasan hukum dan teori-teori yang akan dijadikan landasan kajian. Dokumentasi, dengan cara mengutip atau menyalin dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

### Teknis Analisis dan Penyajian Data.

Data-data yang telah diperoleh dilakukan analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Adapun teknis analisis dan penyajian hasil analisis data dilakukan dalam bentuk: Analisis perkembangan antar waktu (*time series*) hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tabel dan atau grafik /diagram (diagram batang, diagram garis, atau gabungan diagram batang dan garis), Analisis posisi relatif hasil analisis disajikan dalam bentuk diagram/grafik batang atau gabungan diagram batang dan garis. Analisis sebaran antar wilayah Hasil analisis ini disajikan dengan model kuadran kartesius dengan system koordinat dua dimensi yang digambarkan dengan menggunakan grafik xy (*scatter chart*), model grafik yang membagi suatu bidang/kuadran dengan dua sumbu (sumbu x dan sumbu y) saling tegak lurus. Interpretasi pada masing-masing bidang/kuadran tergantung dari persepsi terhadap sumbu x dan sumbu y.

**Gambar 1,**  
**Model Grafik xy (*scatter chart*)**



## HASIL DAN PEMBAHASAN PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO.

### Kondisi Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.

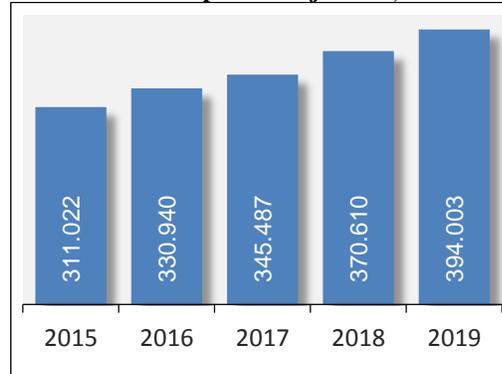
Analisis perkembangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto menganalisa perkembangan data-data kemiskinan makro di Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 tahun terakhir yang meliputi analisis perkembangan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

#### 1) Garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2015-2019 digambarkan sebagaimana grafik pada gambar 2. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2015-2019 terus meningkat. Selama periode tersebut Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto naik sebesar Rp. 82.981,- yaitu dari Rp. 311.022,-/kapita/bulan pada tahun 2015, naik menjadi sebesar Rp. 394.003,-/kapita/bulan pada tahun 2019.

Disparitas garis kemiskinan antar wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto:

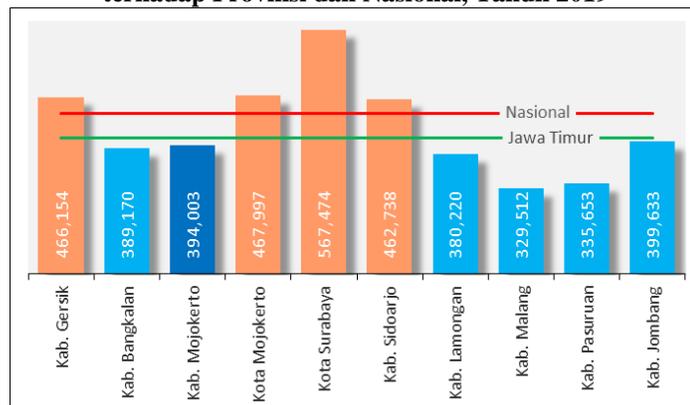
**Gambar 2,**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2015-2019**



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend perkembangan yang konsisten meningkat. Di antara Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 hingga tahun 2017 berada pada posisi ke tujuh, dan pada periode 2018-2019 berada pada posisi ke enam untuk besaran garis kemiskinan per kapita per bulan. Kabupaten Mojokerto bersama dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang selama periode 2015-2019 merupakan Kabupaten dengan garis kemiskinan dengan kategori rendah, karena besaran garis kemiskinannya di bawah besaran garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan besaran garis kemiskinan Nasional.

**Gambar 3,**  
**Posisi Relatif Garis Kemiskinan**  
**Antar Wilayah Gerbang Kertosusila dan Wilayah Sekitar Kab. Mojokerto,**  
**terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019**



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

## 2) Tingkat Kemiskinan

Jumlah dan persentase penduduk miskin:

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan suatu daerah, maka dapat dihitung jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah tersebut. Berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2019, maka jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebanyak 108.810 orang atau sebesar 9,75 persen. Jumlah ini turun dibandingkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 yang berjumlah 111.550 orang atau 10,08 persen dari total penduduk. Perkembangan tingkat kemiskinan (jumlah dan persentase penduduk miskin) Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tahun 2015-2019 sebagaimana di tunjukkan grafik pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4,**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto,**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: *Publikasi BPS - data di olah*

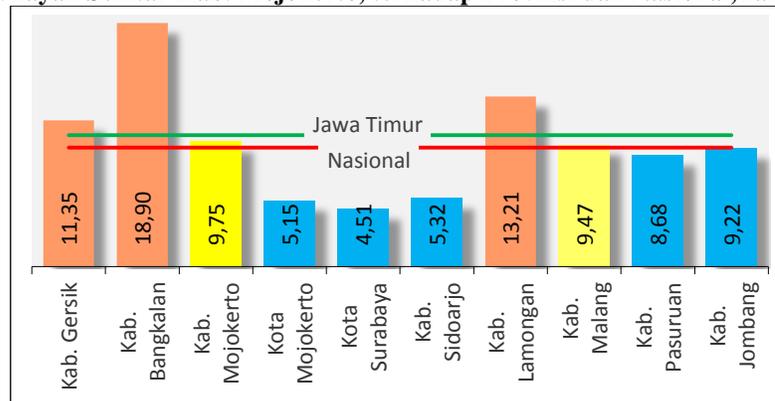
Secara umum, selama kurun waktu tahun 2015-2019, tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya (pengecualian pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin terhadap tahun sebelumnya), dengan rata-rata penurunan penduduk miskin selama periode tahun 2015-2019 adalah sebesar  $\pm 800$  jiwa per tahun atau rata-rata penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 persen per tahun.

Disparitas tingkat kemiskinan antar wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan trend yang menurun. Di antara Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojo-kerto, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015-2019 berada pada posisi ke sembilan untuk jumlah penduduk miskin tertinggi. Selama periode tahun 2015-2019, Kota Mojokerto merupakan Kabupaten /Kota di wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu berkisar Antara 6 sampai dengan 7 ribuan jiwa. Sementara itu Kabu-paten Malang menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar.

Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend perkembangan yang konsisten menurun. Kecuali Kabupaten Mojokerto yang sempat berfluktuasi pada tahun 2016, dan Kota Mojokerto pada tahun 2017, meski demikian keduanya masih menunjukkan trend perkembangan yang cenderung menurun. Di antara Kabupaten/Kota di wilayah

Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015-2019 berada antara posisi ke empat sampai ke tujuh untuk persentase penduduk miskin tertinggi. Sementara itu, pada tahun 2019, persentase penduduk miskin terendah ada di Kota Surabaya yaitu sebesar 4,51 persen, sedangkan yang tertinggi ada di Kabupaten Bangkalan yang mencapai angka sebesar 18,90 persen.

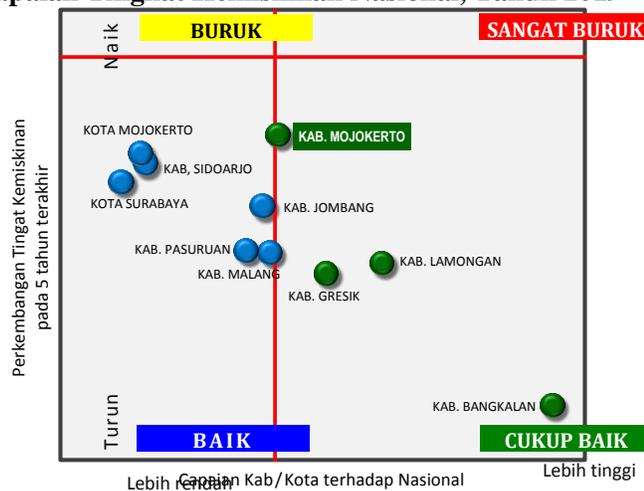
**Gambar 5.**  
**Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Antar Wilayah Gerbang Kertosusila dan Wilayah Sekitar Kab. Mojokerto, terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019**



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

Kabupaten Mojokerto bersama dengan Kabupaten Malang pada tahun 2019 merupakan Kabupaten dengan persentase penduduk miskin pada kategori sedang, karena besaran persentase kemiskinan-nya berada di antara besaran persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan besaran persentase kemiskinan secara Nasional pada tahun yang sama.

**Gambar 6.**  
**Sebaran Kabupaten/Kota menurut Kategori Tingkat Kemiskinan di Wilayah Gerbang Kertosusila dan Wilayah Sekitar Kab. Mojokerto berdasar Capaian Tingkat Kemiskinan Nasional, Tahun 2019**



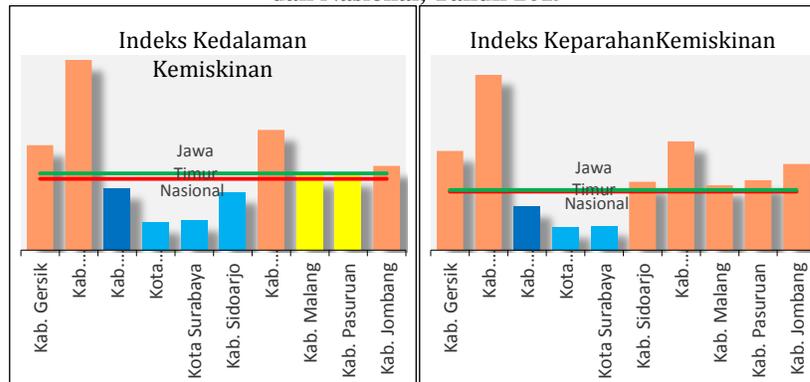
Berdasarkan gambar diagram di atas, Kabupaten Mojokerto bersama 3 Kabupaten lainnya berada pada kategori cukup baik, artinya memiliki trend perkembangan kemiskinan yang menurun hanya saja capaian persentase kemiskinannya masih berada di atas/lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional.

### 3) Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Posisi relatif indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto di antara wilayah Gerbang Kertosusila dan wilayah sekitar terhadap indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional pada tahun 2019 di gambarkan sebagaimana grafik berikut. Berdasarkan grafik pada gambar 7, baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto berada di bawah capaian indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, atau berada pada kategori rendah.

Gambar 7.

#### Posisi Relatif Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Antar Wilayah Gerbang Kertosusila dan Wilayah Sekitar Kab. Mojokerto, terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

Gambaran indikasi keterkaitan/relevansi beberapa indikator umum terhadap indikator-indikator kemiskinan. peningkatan kemakmuran penduduk (di indikasikan dengan me-ningkatnya PDRB per kapita) diikuti dengan peningkatan batas minimal pengeluaran tiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan (garis kemiskinan/GK); peningkatan PDRB per kapita diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan (P0), kecuali pada tahun 2016, hal ini berarti dengan meningkatnya kemakmuran penduduk, maka tingkat kemiskinan akan menurun; peningkatan PDRB per kapita tidak membawa pengaruh pada pe-nurunan TPT, kecuali pada 3 tahun terakhir; meningkatnya garis kemiskinan (GK) diikuti dengan turunnya tingkat kemiskinan (P0), kecuali pada tahun 2016; penurunan persentase penduduk miskin (P0) diikuti dengan turun nya nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

#### Karakteristik Rumah Tangga/Penduduk Miskin.

Karakteristik rumah tangga/penduduk miskin disajikan dengan memanfaatkan sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019.

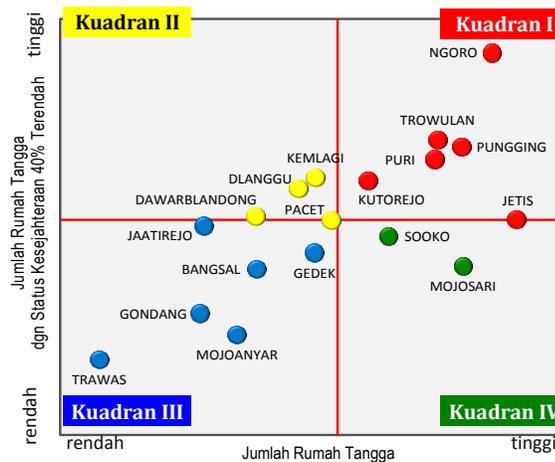
Penggunaan data ini didasari pemahaman bahwa DTKS merupakan salah satu data mikro dengan data cukup lengkap (*by name by address*) hingga tingkat Kecamatan meliputi informasi sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga/individu yang mencakup sampai dengan 40% status kesejahteraan terendah di Indonesia.

1) Status kesejahteraan rumah tangga/individu.

Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah paling sedikit adalah Kecamatan Mojoanyar yaitu sebanyak 4.309 rumah tangga, dan Kecamatan Ngoro dengan sebanyak 9.392 rumah tangga merupakan Kecamatan terbesar untuk jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah.

Dengan menggunakan jumlah rumah tangga pada masing-masing Kecamatan sebagai nilai x, dan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah sebagai nilai y, se-mentara sumbu x adalah nilai rata-rata jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah, dan sumbu y adalah nilai jumlah rumah tangga, maka akan diperoleh sebaran Kecamatan pada kuadran kartesius sebagaimana digambarkan oleh grafik xy (*scatter chart*) berikut ini.

**Gambar 8.**  
**Sebaran Kecamatan menurut Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah, di Kabupaten Mojokerto.**



Penjelasan:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ➤ Kuadran I: (Sangat Tinggi) | Kecamatan-Kecamatan pada kuadran ini merupakan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga maupun jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di atas rata-rata (tinggi) jumlah rumah tangga maupun jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di seluruh Kecamatan.<br>Kecamatan-Kecamatan ini seharusnya menjadi prio-ritas pertama untuk penanganan/penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga; |
| ➤ Kuadran II: (Tinggi)       | Kecamatan-Kecamatan pada kuadran ini merupakan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga di bawah rata-rata (rendah) jumlah rumah tangga pada seluruh Kecamatan, dan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dan status   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di atas rata-rata (tinggi) dari jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah pada seluruh Kecamatan.<br>Kecamatan-Kecamatan ini dapat menjadi prioritas kedua dalam penanganan/penanggulangan kemiskinan;   |
| ➤ Kuadran III:<br>(Rendah) | Kecamatan-Kecamatan pada kuadran ini merupakan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga maupun jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di bawah rata-rata (rendah) jumlah rumah tangga maupun jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah seluruh Kecamatan;   |
| ➤ Kuadran IV:<br>(Sedang)  | Kecamatan-Kecamatan pada kuadran ini merupakan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga di atas rata-rata (tinggi) jumlah rumah tangga pada seluruh Kecamatan, dan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di bawah rata-rata (rendah) dari jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah pada seluruh Kecamatan.. |

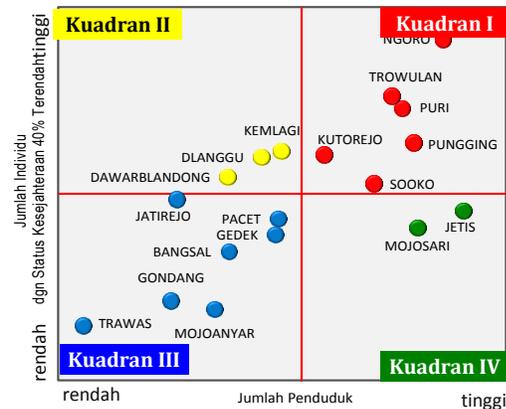
Di samping jumlah rumah tangga, DTKS juga menyajikan agregat jumlah individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia. Di Kabupaten Mojokerto terdapat sebanyak 42.981 individu Desil 1, 96.814 individu Desil 2, 122.277 individu Desil 3, dan 120.315 individu Desil 4, sehingga total di Kabupaten Mojokerto terdapat sebanyak 382.387 individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia. Dari 382.387 individu tersebut meliputi 191.701 individu laki-laki dan 190.686 individu perempuan.

Kecamatan dengan jumlah individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah paling sedikit adalah Kecamatan Trawas yaitu sebanyak 13.297 individu, dan Kecamatan Ngoro dengan sebanyak 30.517 individu merupakan Kecamatan terbesar untuk jumlah individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah.

Dengan menggunakan jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan sebagai nilai  $x$ , dan jumlah individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah sebagai nilai  $y$ , sementara sumbu  $x$  adalah nilai rata-rata jumlah individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah, dan sumbu  $y$  adalah nilai jumlah penduduk, maka akan diperoleh sebaran Kecamatan pada kuadran kartesius sebagaimana digambarkan oleh grafik  $xy$  (*scatter chart*) berikut ini.

Gambar 9.

**Sebaran Kecamatan menurut Jumlah Penduduk dan Jumlah Individu dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah, di Kab. Mojokerto.**



## 2) Status pendidikan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tentang informasi pendidikan meliputi jumlah anak bersekolah dan tidak bersekolah menurut klasifikasi usia dengan status kesejahteraan 40% terendah. Anak bersekolah adalah anak yang pada saat pendataan masih bersekolah, sedangkan anak yang tidak bersekolah adalah anak yang pada saat pendataan belum bersekolah dan tidak lagi bersekolah. Berdasarkan DTKS, anak (usia 7-18 tahun) yang bersekolah dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Mojokerto sebanyak 29.332 anak, sedangkan yang tidak bersekolah sebanyak 4.556 anak.

Kecamatan Trowulan merupakan Kecamatan dengan jumlah terbesar untuk jumlah anak yang tidak bersekolah yaitu sebanyak 442 anak usia 7-18 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah, sedangkan Kecamatan Gondang merupakan Kecamatan dengan jumlah paling sedikit untuk jumlah anak yang tidak bersekolah yaitu sebanyak 121 anak usia 7-18 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah.

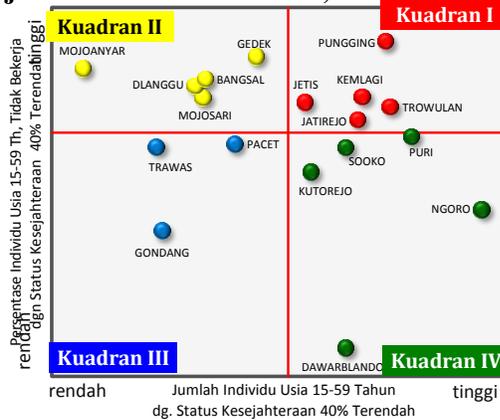
## 3) Status bekerja dan jenis pekerjaan.

Berdasarkan DTKS, di Kabupaten Mojokerto terdapat 174.508 individu usia 15 tahun ke atas yang meliputi 84.070 individu usia tersebut yang bekerja dan 90.438 yang tidak bekerja. Di luar jumlah tersebut, terdapat sebanyak 55 individu usia 5-14 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah yang bekerja.

Kecamatan Pungging merupakan Kecamatan dengan jumlah terbesar untuk jumlah individu usia 15-59 tahun yang tidak bekerja yaitu sebanyak 5.809 individu, sedangkan Kecamatan Mojo-anyar merupakan Kecamatan dengan jumlah paling sedikit sebanyak 1.738 individu dengan status kesejahteraan 40% terendah.

Dengan menggunakan jumlah individu usia 15-59 tahun dengan status kesejahteraan 40% terendah pada masing-masing Kecamatan sebagai nilai x, dan persentase individu usia 15-59 tahun yang tidak bekerja dengan status kesejahteraan 40% terendah pada masing-masing Kecamatan sebagai nilai y, sementara sumbu x adalah nilai rata-rata dari nilai x dan sumbu y adalah nilai rata-rata dari nilai y, maka akan diperoleh sebaran Kecamatan sebagai berikut.

**Gambar 10.**  
**Sebaran Kecamatan menurut Individu yang Tidak Bekerja dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah, di Kabupaten Mojokerto.**



Dari 58.119 rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah, terdapat 44.585 (76,71%) kepala rumah tangga yang bekerja, sisanya sebesar 29,39 persen (13.534 kepala rumah tangga) tidak bekerja. Jumlah kepala rumah tangga dan individu menurut jenis pekerjaan utama adalah sebagian besar (38,13%) kepala rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah, bekerja di bidang pertanian, berikutnya sebesar 16,41 persen di bidang industri pengolahan, dan sebesar 14,08 persen sebagai pekerja konstruksi/bangunan.

Demikian juga halnya pada jenis pekerjaan utama dari individu dengan status kesejahteraan 40% terendah, sebagian besar bekerja di bidang pertanian yaitu sebesar 33,43 persen. Diikuti kemudian dengan jenis pekerjaan utama industri pengolahan dan selanjutnya adalah bidang konstruksi/bangunan, masing-masing sebesar 21,30 persen dan 11,58 persen. Data jumlah Kepala Rumah Tangga dan Individu yang Bekerja menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Utama dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah

#### 4) Informasi pokok rumah tangga.

Jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah dan informasi-informasi-pokok rumah tangga sebagaimana disebut di atas di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut. Informasi pokok rumah tangga yang perlu menjadi perhatian adalah sumber utama air minum: meski aman untuk dikonsumsi, sebanyak 83,60 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah dan sumber utama air minum dari sumber yang terlindungi (sumur bor, sumur gali terlindungi, dan sumber air terlindungi) rawan mengalami krisis pada saat musim kemarau/kering;

Terdapat sebesar 18,19 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah dan bahan bakar/energi utama untuk memasak berupa briket/arang/kayu; sebesar 31,01 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah tanpa fasilitas buang air besar, dan 29,89 persen rumah dengan status kesejahteraan 40% terendah tanpa tempat pembuangan akhir tinja. Analisis sebaran wilayah akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi sasaran program penanggulangan kemiskinan, terlebih dengan keterbatasan anggaran yang dapat di

alokasikan pada APBD, maka penetapan prioritas lokasi sasaran (lokus program) merupakan salah satu solusi.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Dari hasil Analisis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019, maka diketahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebagai berikut:

#### **1) Garis kemiskinan:**

- Pada tahun 2019 meningkat sebesar 6,31 persen (Rp. 23.393,-), pada tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp. 370.610,-/kapita /bulan meningkat menjadi Rp. 394.003,-/kapita/bulan;
- Perkembangan garis kemiskinan selama kurun waktu 2015-2019, menunjukkan trend perkembangan yang konsisten meningkat;
- di wilayah Gerbang Kertosusila, garis kemiskinan Kabupaten Mojo-kerto pada tahun 2019 menempati posisi ke 5 tertinggi, sedangkan di wilayah sekitar, Kabupaten Mojokerto menempati posisi ke 4.

#### **2) Tingkat kemiskinan:**

- jumlah penduduk miskin tahun 2019 turun sebesar 2,46 persen (2.740 orang) terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2018;
- perkembangan selama tahun 2015-2019 menunjukkan trend yang cenderung menurun, kecuali pada tahun 2016 yang sempat naik;
- persentase penduduk miskin pada tahun 2019 turun sebesar 0,33 persen terhadap tahun sebelumnya, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 10,08 persen turun menjadi 9,75 persen pada tahun 2019;
- capaian persentase penduduk miskin tahun 2019 belum memenuhi target P-RPJMD 2016-2021 (target tahun 2019 sebesar 9,5-9,0%), artinya meski program/kegiatan penanggulangan kemiskinan mampu menurunkan tingkat kemiskinan tetapi masih belum efektif dalam memenuhi target RPJMD;
- perkembangan persentase penduduk miskin selama kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan trend yang cenderung menurun, kecuali pada tahun 2016 yang sempat naik, dengan rata-rata penurunannya per tahun sebesar 0,16 persen;
- trend perkembangan persentase penduduk miskin yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan melalui program/kegiatan penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan;
- posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto terhadap capaian di tingkat Provinsi dan Nasional berada pada kategori sedang, artinya capaian Kabupaten berada diantara capaian Provinsi dan Nasional;
- di antara Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila, persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 menempati posisi ke 4 tertinggi, sedangkan di wilayah sekitar, Kabupaten Mojokerto menempati posisi ke 3.

**3) Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan:**

- nilai indeks kedalaman kemiskinan tahun 2019 turun sebesar 0,52 terhadap nilai indeks tahun sebelumnya, hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin per kapita per bulan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 semakin mendekati garis kemiskinan;
- selama periode tahun 2015-2019, meski berfluktuasi, tetapi secara umum masih menunjukkan trend perkembangan yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,02 per tahun;
- perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang cenderung me-nurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik, dengan demikian kebijakan Pemerintah berupa program dan kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak positif;
- nilai indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 turun sebesar 0,21 terhadap nilai indeks tahun sebelumnya, dan selama periode tahun 2015-2019 secara umum menunjukkan perkembangan dengan trend yang cenderung menurun, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang sempat naik;
- perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang cenderung me-nurun mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin mengecil (pengeluaran penduduk miskin semakin homogen);
- pada tahun 2019, posisi relatif indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi dan Nasional berada pada kategori rendah, artinya nilai indeks lebih baik (di bawah) capaian nilai di tingkat Provinsi dan Nasional.

**Rekomendasi**

- 1) Melanjutkan berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini diindikasikan mampu mengurangi angka kemiskinan;
- 2) Memanfaatkan berbagai hasil analisis kemiskinan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan;
- 3) Meningkatkan tata kerja dan penyelenggaraan kerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah (Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan/TKPK Kabupaten Mojokerto);
- 4) Menggunakan/menyepakati satu data kemiskinan terpadu sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan oleh semua OPD;
- 5) Mengembangkan system manajemen informasi data kemiskinan yang mampu mengelola data secara berkelanjutan guna mendukung perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan;
- 6) Dalam penetapan lokasi sasaran program penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diawali dengan melakukan analisis prioritas wilayah dengan memanfaatkan model analisis kuadran kartesius.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 2013. Buku Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto 2013. Kabupaten Mojokerto : Bappeda.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 2019. Analisis Kemiskinan Makro Kabupaten Mojokerto Tahun 2018. Kabupaten Mojokerto : Bappeda.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2019. Profil Kemiskinan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto : Bappeda.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2019. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2019. Kabupaten Mojokerto : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019. Kabupaten Mojokerto : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2020. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2020. Kabupaten Mojokerto : BPS.